



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AHMAD SU'ADI
2. Jabatan : ANGGOTA OMBUDSMAN RI
3. NHK : 455605

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.544.092.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 106 m²/96 m² di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 210.260.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 222 m²/600 m² di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 639.828.000
3. Tanah Seluas 4685 m² di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 46.850.000
4. Tanah Seluas 749 m² di KEBUMEN, WARISAN Rp. 45.240.000
5. Tanah Seluas 1553 m² di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.090.206.000
6. Tanah Seluas 622 m² di KEBUMEN, WARISAN Rp. 8.708.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m²/59 m² di KARANGASEM, HASIL SENDIRI Rp. 468.000.000
8. Tanah Seluas 600 m² di SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 224.000.000

1. MOBIL, TOYOTA ALL NEW INOVA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
5. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.



15.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	205.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	20.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	380.000.000
Sub Total	Rp.	3.373.092.000
III. HUTANG	Rp.	530.534.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.842.558.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi penuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.